

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut mendeskripsikan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham sementara agen adalah manajemen. Dalam teori keagenan disebutkan bahwa manajemen merupakan pihak yang di kontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Manajemen dituntut mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan pekerjaannya kepada pemegang saham Siregar (2015).

Menurut Siregar (2015) “Teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan”.

Teori keagenan menjelaskan fenomena ini ketika DPR sebagai prinsipal menuntut agen untuk taat terhadap kontrak yang ditetapkan. Kontrak yang dimaksud adalah peraturan perundang-undang mengenai tenggat waktu pelaporan keuangan dan sesuai dengan teori kepatuhan, pemda harusnya memiliki keterikatan untuk mengikuti atau patuh terhadap undang-undang tersebut dimana hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi Saputra & Ariani (2018).

Pemerintah Daerah (Pemda) juga menerima pelimpahan wewenang atas pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Pertanggungjawaban Pemda selaku agen terhadap wewenang yang diberikan rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah di audit BPK. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku prinsipal adalah pengemban fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

Kinerja kepala daerah akan di nilai dalam laporan pertanggung jawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan berbagai program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang di peroleh pemda Aprila *et al.*, (2019).

Penggunaan standar akuntansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketetapan waktu laporan keuangan sehingga tidak terjadinya *audit delay*, sebagai bentuk pertanggung jawaban dari agen kepada prinsipal. Pemerintah daerah merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Ketepatan waktuan penyampaian laoproan keuangan dapat menjadi salah satu tolak ukur dari pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagai agen kepada masyarakat yang sebagai prinsipal.

2.2 *Audit Delay*

Menurut Payne dan Jansen (2002) dalam Tullah *et al.*, (2019) *audit delay* merupakan rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor. Dalam arti lain jarak waktu antara akhir tanggal fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemda diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Tanggal penyerahan LKPD *unaudited* ini menjadi sangat penting sebab semakin lambat penyusunannya akan menggeser waktu penyelesaian audit oleh BPK Aprila *et al.*,(2019).

Menurut Bakar & Arza, (2019) “mengemukakan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Dapat disimpulkan bahwa semakin lama proses audit dimulai semakin besar kemungkinan terjadinya *audit delay*”.

Kapan dimulainya audit keuangan yang dilakukan oleh BPK tergantung pada kapan laporan keuangan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. Semakin lama pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK, maka *audit delay* semakin panjang.

Sehingga semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Proses audit memerlukan waktu sehingga berakibat kepada *audit delay* yang nantinya berpengaruh pada ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyempamaan laporan keuangan semakin besar.

2.3 Laporan Keuangan

Menurut Bakar & Arza, (2019) “Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan Keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan suatu instansi atau perusahaan. Laporan keuangan dibuat setiap satu periode pelaporan akuntansi”.

Sholihat *et al.*, (2021) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia.

Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*) (Peraturan Pemerintah RI, 2010).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan
- d. Pemerintah

Laporan keuangan pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSal)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut PSAK 2009 adalah :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan.

3. Keandalan

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.4 Ukuran Pemerintah

Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki sumber dayai atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik Siregar (2015).

Ukuran pemerintah diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Maksudnya dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada

pemerintah kota. Aset pemerintah daerah memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan aset daerah yang lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak maka diperlukannya waktu dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Dengan demikian, maka pemerintah dengan aset yang besar cenderung memiliki kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga *audit delay* dapat berkurang.

2.5 Tingkat Kemandirian Daerah

Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (PP No. 105 Tahun 2000).

Menurut Nataluddin dalam Rizkiano (2011), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, sebuah daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah akan cenderung mempunyai kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Hal ini akan berdampak pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang terbatas juga. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan

daerah dalam melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat waktu untuk meminimalisasi *audit delay*.

2.6 Temuan Audit

Temuan audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor dilapangan. Jumlah temuan audit berpengaruh pada lamanya penyelesaian laporan audit. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik di internal BPK antara tim audit lapangan dengan penanggungjawab audit maupun diskusi atas temuan audit tersebut.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap LKPD atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit diukur dengan jumlah temuan yang muncul dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Dengan demikian, banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi auditor sehingga berpengaruh terhadap lamanya penyelesaian laporan audit.

2.7 Terpilihnya Kembali Kepala Daerah

Kepala daerah yang terpilih kembali lebih banyak memiliki pengetahuan dari pada kepala daerah yang baru terpilih. Kepala daerah yang terpilih kembali lebih mengetahui mengenai langkah-langkah persiapan dalam memberikan fasilitas prosedur audit dan standar prosedur akuntansi.

Kepala daerah yang telah terpilih kembali lebih banyak memiliki pengalaman terkait penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan kepala daerah yang baru terpilih. Dengan pengalaman dan pengetahuan tersebut, kepala daerah bertahan diharapkan dapat membuat kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam prosedur akuntansi. Sedangkan jika terpilihnya kepala daerah yang baru, ia cenderung akan menginvestigasi masalah keuangan daerah dalam rangka mengungkapkan isu-isu tersembunyi dalam laporan keuangan dan akan merekrut auditor untuk menyelesaikannya. Hal ini cenderung dikhawatirkan akan memperpanjang masa persiapan pelaporan keuangan daerah. Sehingga untuk

kepala daerah yang terpilih kembali dapat menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Dengan demikian, terpilihnya kembali kepada daerah sebelumnya dapat mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan sehingga *audit delay* tidak terjadi.

2.8 Leverage

Leverage adalah pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati hatiannya sehingga rentang *audit delay* akan lebih panjang Angruningrum dan Wirakusuma (2013).

Semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat *audit delay* semakin rendah. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya dan diduga dapat mengurangi *audit delay*.

2.9 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang. Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini yang di uraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ziza Gita Hardini dan Sukirman (2016)	Analisis Determinan <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1: Akuntabilitas Kinerja X2 : Ukuran Daerah X3 : Opini Auditor Y : <i>Audit Delay</i>	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kinerja, ukuran daerah, dan opini auditor secara simultan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (diterima) • Akuntabilitas kinerja secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (ditolak) • Ukuran daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (diterima) • Opini auditor secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (diterima)

2	Maidelfia n Putra Bakar dan Fefri Indra Arza (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan <i>Leverage</i> (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)	X1 : Ukuran pemerintah X2 : Opini Audit X3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Audit Delay</i>	Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa : <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> • Opini audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> • <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
3	Nila Aprila, Fachruzza man, dan Desi Siska Pratiwi (2019)	Pengaruh Opini Audit dan Kualitas Auditor Terhadap <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Opini Audit X2 : Kecakapan Profesional X3 : Latar Belakang Pendidikan Y : <i>Audit Delay</i>	Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa : <ul style="list-style-type: none"> • Opini audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia • Kecakapan professional berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia • Latar belakang pendidikan akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
4	Zaenal Wafa , Nugraeni (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah	X1 : Ukuran pemerintah X2 : Pengalaman Pemerintah	Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa : <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran pemerintah daerah berpengaruh

		Kabupaten/Kota di Indonesia	X3 : Jumlah temuan audit X4 : Opini Audit Y : <i>Audit Delay</i>	<p>terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia diterima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman pemerintah menerapkan SAP berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia diterima • Jumlah temuan audit berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia diterima • Opini audit berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia diterima
5	Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti dan Fitri Rianti (2019)	Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2018	X1 : Ukuran daerah X2 : Opini Audit X3 : Tingkat Ketergantungan Daerah Y : <i>Audit Delay</i>	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran daerah berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> ditolak berarti bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> • Opini audit berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> diterima dan dapat

				<p>diartikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap <i>audit delay</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (diterima)
6	Fajar Hendro Wibowo , Endang Purwaningsih (2019)	Pengaruh Nilai APBD, Total Aset, Opini Audit, dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap <i>Audit Delay</i> Pemerintah Daerah di Subosukowonosraten	X1 : Nilai APBD X2 : Total Asset X3 : Opini Audit X4 : Latar Belakang Pendidikan Y : <i>Audit Delay</i>	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai APBD berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Delay</i> • Total Aset berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Audit Delay</i> • Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> • Latar Belakang Pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Audit Delay</i>
7	Abriany Vanesha, Efrizal Syofy (2020)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit Dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Petahana) Terhadap <i>Audit Delay</i> Pada	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Opini Audit X3 : Petahana/incumbent Y : <i>Audit Delay</i>	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran pemerintahan yang diprosikan dengan besarnya APBD tidak berpengaruh signifikan.

		Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2014-2018)		<ul style="list-style-type: none"> • Opini audit berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> • Petahana/incumbent tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i>
8	Baldric Siregar (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap <i>Audit Delay</i> Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Ukuran pemerintah X2 : Nilai APBD X3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Audit Delay</i>	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap <i>audit delay</i>. • Nilai APBD tidak berpengaruh positif atau negatif sehingga bisa di simpulkan bahwa nilai APBD tidak sesuai dengan prediksi. • Nilai <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>.
9	Rina Rahmawati, Verawaty (2021)	Analisis Determinan <i>Audit Delay of Government Financial Report</i> pada Pemerintah Provinsi di Indonesia	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya X3 : Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah X4 : Temuan Audit X5 : Akuntabilitas Kinerja X6 : Lokasi Pemerintah Daerah	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (ditolak). Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (ditolak). • Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh

			X7 : Penyerahan LKPD dari Pemerintah Daerah kepada BPK Y : <i>Audit Delay</i>	<p>terhadap <i>audit delay</i> (diterima).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temuan Audit berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (ditolak). • Akuntabilitas Kinerja tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (ditolak). • Lokasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (ditolak). • Lokasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> (ditolak). • Penyerahan LKPD dari Pemerintah Daerah kepada BPK berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.
10	Iga Alfiana Syahyuni, Fefri Indra Arza, Mayar Afriyenti (2018)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap <i>Audit Delay</i>	X1 : Ukuran pemerintah X2 : Ketergantungan Pemerintah Daerah X3 : Opini Audit Y : <i>Audit Delay</i>	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemrintah berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Delay</i> • Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Delay</i> • Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>
11	Yogyaria Astin	Pengaruh ukuran pemerintah	X1 : Ukuran pemerintah	<p>Hasil Pengujian Menunjukkan Bahwa :</p>

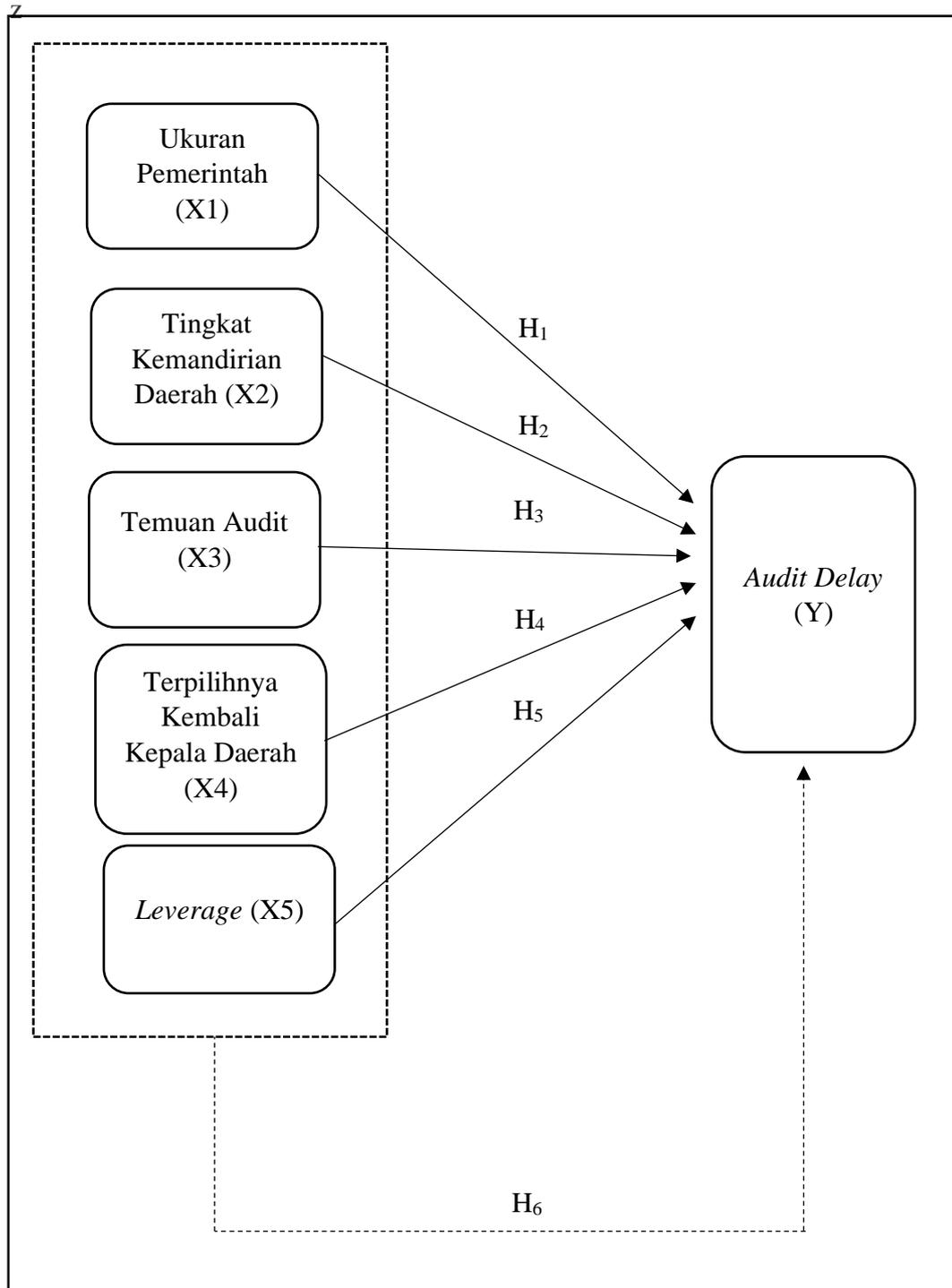
	Kartika Gemilang, Yulinda Devi Pramita (2021)	daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit dan temuan audit terhadap <i>audit delay</i>	X2 : Ketergantungan Pemerintah Daerah X3 : Temuan Audit X4 : Opini Audit Y : <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> • Ketergantungan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Delay</i> • Opini Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> • Temuan Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i>
--	---	--	--	--

Sumber : Penelitian Terdahulu Tahun 2015-2021.

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih Sugiyono(2011).

Berdasarkan landasan teori dan masalah yang diteliti, maka peneliti menguraikan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas objek yang akan diteliti. Peranan pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk

menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah dan *Leverage* secara parsial maupun simultan mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.10.1 Hubungan Ukuran Pemerintah terhadap *Audit Delay*

Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik (Siregar, 2015).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziza Gita Hardini dan Sukirman (2016), Maidelfian Putra Bakar dan Fefri Indra Arza (2019), dan Baldrice Siregar (2015) yang menunjukkan bahwa *audit delay* memiliki hubungan negatif dengan ukuran pemerintahan. Artinya bahwa semakin besar aset pemerintahan maka semakin pendek *audit delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

2.10.2 Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah terhadap *Audit Delay*

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (PP No. 105 Tahun 2000). Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah akan cenderung mempunyai kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Hal ini akan berdampak pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang terbatas juga. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan daerah dalam melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat waktu untuk meminimalisasi *audit delay* (Fachrurrozi, 2014).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachrurozi (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Sehingga jika tingkat kemandirian daerah baik maka akan mengurangi terjadinya *audit delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Tingkat kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

2.10.3 Hubungan Temuan Audit terhadap *Audit Delay*

Temuan audit merupakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Semakin banyak temuan audit pada periode lalu akan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan tersebut sehingga terjadi perubahan yang lebih baik dan diharapkan dapat mengurangi temuan audit pada periode selanjutnya yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang lebih baik.

Gambaran temuan audit pada tahun-tahun sebelumnya akan mempercepat penyusunan laporan keuangan dan akan mendorong auditor untuk menindaklanjuti temuan tersebut sehingga mengurangi temuan audit pada tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Temuan audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

2.10.4 Hubungan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah terhadap *Audit Delay*

Terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya (petahana) diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan serta dapat mengurangi *audit delay*, karena terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya memiliki pengetahuan serta pengalaman yang lebih banyak terkait dengan standar dan prosedur akuntansi serta lebih mengetahui langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk memfasilitasi prosedur audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Terpilihnya Kembali Kepala Daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

2.10.5 Hubungan *Leverage* terhadap *Audit Delay*

Leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya Siregar (2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

2.10.6 Hubungan Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah dan *Leverage* terhadap *Audit Delay*

Keinginan Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang baik atau *good governance* mendorong pemerintah untuk mewujudkan konsep *accountability* yang artinya pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik tentunya akan menyusun laporan keuangannya dengan baik sehingga dapat menekan *audit delay* Ziza Gita Hardini (2016).

Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah dengan sumber daya yang banyak biasanya relatif lebih lambat daripada pemerintah dengan sumber daya yang lebih sedikit. Pemerintah yang memiliki aset yang banyak mengakibatkan jumlah transaksi semakin banyak pula sehingga hal ini menyebabkan lambatnya proses penyusunan laporan keuangan. Ukuran pemerintah yang besar akan memiliki sumber informasi yang lebih banyak yang disertai dengan adanya pengawasan sehingga pemerintah melaporkan audit nya lebih cepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *Audit Delay*.